



Available online at

<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>

Published by Departement of History and Islamic Culture, Faculty of Ushuluddin Adab and Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Dinamika Partai Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Umum 1955 di Jawa Barat

Budi Sujati

budisujati@gmail.com

Program Studi Pendidikan Sejarah

STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

Abstract

The first Islamic Congress in Cirebon in 1922 was one of the seeds of opposition between Reformers and Traditionalists. This was followed by a compilation of two camps which were agreed to hold the Masyumi Party as a symbol of the unity of the Muslims. However, in reality, there was a successful conflict between the Traditionalist and Reformist camps so that the Traditional camp represented by NU was canceled by the Masyumi ties by holding the 19th NU Conference in Palembang 1952. This had implications for the existence of the NU Party in West Java to invoke its hegemony, together with Masyumi so that in the 1955 general election the NU Party only voted under Masyumi, PNI and PKI. This paper will explain how the dynamics faced by the West Java Nahdlatul Ulama when jamiyah changed course became a political party that had implications for the existence of the West Java NU Party before the election took place or afterwards. This research is descriptive with a qualitative methodology. The use of this method is to be able to explain a phenomenon that occurs in the Nahdlatul Ulama organization as a result of becoming a Political Party by using a Politological approach through the stages of Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography.

Keywords: *West Java, Nahdlatul Ulama, Political Parties.*

1. Pendahuluan

Kemunculan Nahdlatul Ulama dalam kegiatan politik praktis mulai intens terjadi antara kelompok Islam tradisional dan Islam Reformis di Jawa Barat sejak diadakannya “*Congres Nahdlatoel Oelama ke-3 tahun 1928 di Surabaya*.”¹ Salah satu agenda pentingnya adalah untuk menyebarkan organisasi ini ke berbagai daerah di pulau Jawa dan Madura yang akan dilaksanakan oleh *Lajnah Nashihin* (Komisi Propaganda) dalam rangka menghambat pengaruh kaum reformis di Pulau Jawa.² Untuk daerah Jawa Barat, upaya mendirikan cabang NU diberikan kepada KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, dan KH. Abdul Halim Majalengka. Ketiga kyai tersebut relatif dapat melaksanakan amanah Kongres yang terlihat dari kedatangan utusan dari 13 cabang yang ada di Jawa Barat untuk menghadiri Kongres ke-4 di Semarang tahun 1929. Selain itu, dalam Kongres tersebut, KH. Dimiyati dari pesantren Sukamiskin Bandung menyatakan dukungannya kepada NU sehingga keberadaannya organisasi tersebut di Jawa Barat semakin menguat.

Dengan keberhasilan dalam merekrut anggota untuk menjadi pendukung NU seperti utusan-utusan yang hadir pada kegiatan Kongres NU, sehingga dalam perkembangannya dalam menjelang Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 NU sangat antusias untuk berkompetisi merebut simpati masyarakat Indonesia. Antusiasme

¹Nama utusan yang hadir dalam Kongres NU Ketiga di Surabaya pada 12 Rabiul Tsani 1347 H atau 28 September 1928 menurut Majalah “Berita Nahdlatoel Oelama” yang berasal dari Jawa Barat diantaranya: KH. Abd Rachman, K. Toebaqris, H. Moehammad Arif (Tanfidziyah). E.E. Ismail (Pandeglang), K. M. Abbas, J. M. Moeslim (Tanfidziyah) Saijid Awoed Bansjar (Cheribon), KH. Dja’far Sodiq (Tanfidziyah) KH. Fadhil (Tasikmalaja), KH. Moehammad Zain, merangkap Tanfidziyah (Indramajoe), KH. Abdullah (Tanfidziyah) R. M. Dachlan (Bandoeng), KH. Ali Bsiri merangkap (Tanfidziyah) (Serang), K. Faqih merangkap Tanfidziyah (Purwakarta). Lihat: Madjallah Berita Nahdlatoel Oelama “Congres Nummer ketiga” 9 Rajab 1356 H atau 15 September 1937 M, (Soerabaja: Kantoer Hoofdbestuur N.O. Jl. Sasak Str. No. 66), 33.

² Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), 69.

tersebut didasarkan karena NU merupakan salah satu organisasi jam'iyah terbesar di Indonesia yang pernah menjelma menjadi partai politik.³ Hal ini merupakan salah satu tantangan (*challenge*) yang harus dihadapi NU sebagai konsekuensi logis terhadap perubahan identitas dirinya. Perubahan tersebut tentu menjadikan NU sangat menarik untuk diketahui sebab dan akibatnya (kausalitas). Bagaimana organisasi sosial keagamaan dengan mudah mengganti baju jam'iyah dengan baju politik. Apakah hal tersebut merupakan perselisihan antara Masyumi dengan para tokoh-tokoh NU yang mulai kehilangan posisi strategis di Partai Politik terbesar Islam tersebut pada masanya di Indonesia. Sehingga romantisme yang dihadapi oleh NU dalam konsekuensinya merubah haluan jam'iyah menjadi Partai Politik menjadikan NU bersikap akomodatif dan kooperatif pada setiap pemerintahan yang berkuasa di eranya.⁴

Keikutsertaan NU dengan persoalan-persoalan politik tersebut didasarkan atas satu pemahaman bahwa agama Islam mengatur kebebasan bagi umatnya untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sehingga secara teoritis dan praktis dengan keikutsertaannya dalam politik sebagai salah satu anjuran yang diperbolehkan oleh Islam, karena hakikat Islam yang sempurna merangkum semua urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia kedalam kehidupannya di dunia dan akhirat.⁵ Agar lebih memahami dari rekonstruksi NU menjadi partai politik, suatu permasalahan harus melihat fenomena-fenomena yang

³ Tidak didapatkan angka pasti mengenai jumlah anggota pada awal 1940-an meskipun kelihatannya masuk akal hipotesa sementara bahwa NU memiliki paling sedikit 120.000 anggota waktu itu. NU mengklaim jumlah anggotanya mencapai 99.000 pada 1938 dan jumlah cabang-cabang meningkat sekitar 20% antara 1938 dan 1942. Lihat: Greg Fealy (Penj). Farid Wajidi, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 130.

⁴ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), 57.

⁵ Dhiauddin Rais, (Penj). Abdul Hayyie al-Kattani, *Toeri Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.

melatarbelakangi NU menjadi partai Politik dan bagaimana dipengaruhi oleh semangat zamannya (*zeitgeist*).⁶

Tulisan ini berusaha menjelaskan dinamika-dinamika yang menyebabkan NU menjadi Partai Politik dengan eksistensi Nahdlatul Ulama Jawa Barat dalam kegiatan Pemilu 1955. Pertentangan yang sering terjadi di wilayah Jawa Barat antara kubu Reformis dengan kubu Tradisionalis merupakan salah satu cara dari kedua kubu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Jawa Barat. Dikarenakan di wilayah ini tumbuh subur organisasi-organisasi Islam lokal Jawa Barat seperti Mathlaul Anwar dari Pandeglang, Al-Itihadul Islamiyah dari Sukabumi, Persatuan Islam dari Bandung, Persatuan Umat Islam dari Majalengka, Al-Irsyad dari Jakarta dan lain sebagainya yang pada akhirnya dari organisasi Islam lokal tersebut masuk kepada dua kubu yakni Reformis yang diwakili oleh Muhammadiyah dan Persis dan kubu tradisionalis yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Dengan melihat fenomena tersebut, maka Pemilu 1955 merupakan ajang untuk memperebutkan suara umat Islam di Jawa Barat sehingga NU sebagai organisasi yang mewadahi kalangan pesantren menjadikan wilayah ini sangat menarik untuk diteliti terutama pada masa Pemilu pertama. Untuk memfokuskan pembahasan ini, maka unsur temporal dalam tulisan ini adalah kegiatan Muktamar NU ke-19 di Palembang pada 1952 hingga kegiatan Pemilu 1955 selesai beserta dinamika-dinamikanya, Sehingga akan mudah memberikan penjelasan suatu peristiwa sesuai dengan data dan fakta yang ada.

2. Hasil dan Pembahasan

Dinamika NU dari Jamiyah menjadi Partai Politik

Keikutsertaan NU dalam dunia politik sebenarnya sudah ada semenjak NU dibentuk pada 1926. Pembentukan NU sendiri lahir karena adanya gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kalangan

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 44

modernis terhadap kalangan tradisional.⁷ Bagi masyarakat Islam saat ini, fakta-fakta historis tersebut merupakan pertanda kemunculan kembali rasa pertikaian yang ada antara tradisional-modernis yang pernah ada pada masa 1920-an sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama dengan diselenggarakannya kongres Al-Islam Pertama yang diadakan di Cirebon, Jawa Barat pada 31 Oktober 1922 sampai 2 November 1922 yang saling menjatuhkan antara kubu reformis maupun tradisional.⁸ Pada 8-6 Januari 1926 beberapa golongan modernis mengadakan pertemuan di Cianjur. Adapun agendanya adalah mempersiapkan pelaksanaan Kongres Al-Islam di Bandung yang diselenggarakan pada Februari 1926 dengan membahas siapa saja tokoh-tokoh yang diutus dalam kongres Khilafah di Mekkah. Kemudian pada 6 Februari 1926 tercapailah agenda Kongres tersebut yang dihadiri oleh beberapa golongan modernis, namun dari pihak tradisional tidak hadir, maka mulai dari peristiwa tersebut salah satu ketidakharmonisan hubungan kedua kubu tersebut⁹.

Partisipasi NU dalam politik mulai terlihat ke permukaan semenjak dibentuknya Masyumi yang bertransformasi menjadi Partai Politik ketika dilangsungkan Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada 19 Februari 1940 dengan dihadiri dari beberapa laskar Pemuda Islam diantaranya: Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Islam Indonesia, Pemuda Perserikatan Ulama Indonesia, Laskar Persatuan Arab

⁷ Istilah Modernis dan Tradisionalis muncul ketika lahir gerakan pembaharuan di dunia Islam pada abad ke-19 dan mulai dikotomikan secara aktif ketika terjadinya kongres Al-Islam pertama di Cirebon pada 1922 M karena terjadinya pertentangan antara kubu pendukung pembaharu dan kontra Pembaharu. Kubu pertama yang disebut pembaharu sering diistilahkan dengan sebutan kaum modernis, pembaharu, dan reformis. Sedangkan kelompok tradisional merupakan pendukung para kyai dan ulama konservatif. Lihat: Agung Purnama, *Pergulatan Pemikiran kyai Nahdlatul Ulama dengan kaum modernis Islam di Jawa Barat (1930-1937)*, (Bandung: Jurnal Patanjala Vol. 9 No. 2 Juni 2017), 310.

⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), 427.

⁹ Agung Purnama, *Jamiyah Nahdlatul Ulama di Jawa Barat 1926-1945*, (Sumedang: Tesis Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2017), 84.

Indonesia, *Sjoebban Al-Irsyad*, *Ansor Nahdlatul Oelama*, Pemuda Persatuan Islam dan lain-lain.¹⁰

Dukungan NU pada Masyumi pada asalnya vokal dan lantang dengan menyerukan kepada anggotanya khususnya para Pemuda yang tergabung dalam *Anshar Nahdlatol Oelama* (A.N.O) dan masyarakat untuk berpartisipasi pada Masyumi sehingga dengan dukungan dari NU, Masyumi menjadi partai politik dengan pengikut terbesar pada masanya karena keterlibatan NU yang memiliki simpatisan yang tersebar di Indonesia. Pada Kongres NU ke-16 di Purwokerto tahun 1946 salah satu putusannya adalah menyerukan supaya warga Nahdliyin bergabung pada partai Masyumi.¹¹ Namun dukungan NU yang diberikan kepada Masyumi tidak direspon secara baik oleh para pengurus sehingga setiap pergantian kepengurusan menjadikan partai Masyumi tidak bersahabat lagi seperti ketika Partai Masyumi pertama di bentuk. Warga Nahdliyin sangat antusias sekarang situasinya berbeda yang mengakibatkan munculnya kekecewaan dari NU.¹²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan NU berpisah dari Masyumi salah satunya dapat dilihat dari perbedaan sudut pandang keagamaan. Menurut pendapat NU, sejak akhir tahun 1949 struktur organisasi Masyumi telah dirubah sedemikian rupa sehingga Majelis Syuro bukan lagi wadah yang penting bagi kyai karena majlis tersebut sudah tidak lagi sebagai lembaga legislatif melainkan diturunkan fungsinya sebagai dewan penasehat semata, segala permasalahan yang menyangkut Partai Masyumi jika ada permasalahan diambil dari sudut pandang politik belaka dan tidak mengambil pedoman agama.

¹⁰ Madjallah Soeara A.N.O, *Congres Besar Nahdlatol-Oelama di Surabaya ke-15*, Rabiul Awwal 1359 H/ April 1940 M. No. 1, Tahoen ke-3.

¹¹Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 57.

¹²Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2009),93.

Faktor lainnya adalah pertikaian dalam organisasi Masyumi bersifat kompleks. Adapun yang sering muncul ke permukaan adalah perselisihan antara kubu tradisional dan modernis. Dalam hal ini kubu tradisional yang paling banyak pengikutnya adalah NU di dalam Masyumi dengan organisasi lainnya yang sama dengan skala lokal kecil diantaranya: Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) dari Sumatera Barat, Jamiyatul Washliyah dan Al-Ittihaddiyah dari Sumatera Utara, Persatuan Umat Islam, Mathlaul Anwar dari Jawa Barat, dan Nahdlatul Wathan dari Nusa Tenggara Barat. Sedangkan yang berasal dari kalangan Modernis terwakili oleh Muhammadiyah dengan organisasi lokal yang skalanya juga kecil seperti: Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad dari Jawa Barat, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).¹³

Faktor yang mempercepat berpisahnya NU dengan Masyumi adalah terutama setelah kalangan reformis mulai melakukan kritikan terhadap kepemimpinan Menteri Agama yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim berasal dari kalangan NU. Ketika sebelumnya peran-peran NU dipegang dalam posisi Majelis Syuro mulai tersisihkan. Diawali dengan re-strukturisasi Partai Masyumi yang merugikan kepentingan NU. Salah satu contohnya adalah semakin mengecilnya peranan ulama dan Majelis Syuro salah satu fungsinya sebagai Dewan Penasehat sudah tidak diperhitungkan kembali dalam pengambilan keputusan. Dengan problematika yang ada, NU menyarankan agar merubah Partai Masyumi dirubah menjadi lembaga Federasi dengan alasan agar NU mendapatkan hak-haknya lagi seperti Partai Masyumi pertama kali dibentuk. Namun, saran tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pimpinan Partai Masyumi yang dipegang oleh kubu modernis.¹⁴

¹³ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1962), 134-136.

¹⁴ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 110.

Transformasi NU dari Jamiyah menjadi Partai Politik

Muktamar NU ke-19 di Palembang pada 1952 dalam kegiatannya merupakan Muktamar terbesar yang pernah diadakan oleh NU. Dihadiri oleh 234 utusan yang mewakili 86 dari 134 cabang NU se-Indonesia dengan menghasilkan keputusan yang sangat menentukan perjuangan NU di masa-masa akan datang yakni keputusan memisahkan diri dengan Masyumi, berdiri sendiri sebagai Partai Politik.¹⁵ Dampak dari keputusan menjadi Partai Politik, Jika pada sebelumnya hanya memfokuskan pada persoalan-persoalan sosial dan keagamaan, sejak Muktamar tersebut NU menambah urusan kegiatannya kepada ranah politik. AD-ART pun tidak lagi berbentuk jami'yah tetapi menjadi AD-ART Partai politik NU. Kegiatan usahanya juga semakin kompleks sudah menyangkut persoalan politik dalam negeri, politik luar negeri, persoalan keamanan dan pertahanan, persoalan sosial-budaya, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.



Suasana Kegiatan Muktamar NU ke-19 di Palembang pada 1952
(Sumber: Koleksi Fanspage Galeri Nahdlatul Ulama)

¹⁵ Pimpinan sidang dipimpin oleh ketua Muda PBNU KH. A. Wahid Hasjim, Lihat: Aboebakar, *Sedjarah Hidup K.H. A. Wahid Hasjim dan Karangannya Tersiar*, (Djakarta: Panitia Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957), 491.

Walaupun demikian, NU tidak akan lupa terhadap identitas jati dirinya untuk mengusahakan dan mengurus masyarakat Islam agar bisa sejahtera, adil dan makmur. Jamiyah Nahdlatul Ulama tetap pada tujuan awalnya yakni kepentingan umat Islam dengan menempatkan kyai atau ulama dalam strata kemasyarakatan tetap pada posisi sentral. Daftar keanggotaannya juga masih tetap dipertahankan, yaitu masyarakat pribumi yang beragama Islam dengan menganut salah satu dari empat madzhab.

Sebagai salah satu bukti nyata bahwa NU tetap fokus pada masalah sosial-keagamaan untuk kepentingan Islam adalah pada 14 Juli 1952 NU membentuk Panitia Pembangunan untuk umat Islam di seluruh Indonesia, salah satunya adalah surat yang ditujukan kepada pengurus NU cabang Karawang.¹⁶ Surat itu dalam kegiatannya bahwa tiap-tiap cabang NU di Indonesia harus tetap menjaga solidaritas dan kekuatan warga NU dalam sebuah Partai NU, disamping mengurus umat adalah tanggungjawab yang harus diemban oleh NU walaupun dalam masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, tetapi NU walaupun sudah menjadi wadah politik hal itu tidak dilupakan sama sekali.

Disamping itu, partai NU bertindak dengan mengadakan berbagai cara untuk mengatasi berbagai masalah lainnya seperti kualitas SDM pada awal-awal berdirinya Partai NU salah satunya adalah program rekrutmen dan konsolidasi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang politik dalam mensejahterakan umat Islam. Dengan syarat sumber daya manusia (SDM) beragama Islam dan menganut salah satu dari madzhab Imam atau berpaham *Ahlussunah Wal Jamaah*, maka sumber daya manusia NU bisa bersaing dengan kalangan modernis yang menganggap golongan tradisionalis memiliki sumber daya manusia yang rendah. Selain dari kriteria diatas, para kader/ simpatisan juga harus memiliki

¹⁶ANRI. Sokongan Resolusi Partai/Golongan Islam di Nias, No. 220/Tanf/VII/52. 3 Dzulqa'dah 1371/ 24 Djuli 1952. NU 1948-1979.1823.

kepatuhan kepada para kyai (ajengan), walaupun kepatuhan tersebut sifatnya hanya formal.

Salah satu hasil rekrutmennya adalah terjadi di daerah Sukabumi. Dimana dengan Perantara KH. Moh. Djunaidi selaku Kepala Biro Peradilan Agama Pusat telah mendatangi kantor PBNU agar seorang Ulama terkenal di Sukabumi yang bernama KH. Achmad Marfu' Kamil yang tinggal di Kampung Tjaringin, Tjibadak Sukabumi supaya dia mendirikan dan mengembangkan Majelis Wakil Tjabang (MWT) dan di Tjaringin sendiri dapat pula didirikan Ranting Nahdlatul Ulama. Tujuannya adalah jelas agar masyarakat umat Islam *Ahlussunah Waljamaah* di Tjibadak dapat memahami lebih jauh tentang NU dan disalurkan partisipasi suaranya kedalam Partai Nahdlatul Ulama.¹⁷ Tokoh-tokoh masyarakat atau pemuka-pemuka agama yang memiliki kemampuan dalam menarik hati masyarakat menjadi target rekrutmen bagi simpatisan/ kader NU di berbagai daerah khususnya Jawa Barat. Sehingga dengan tradisinya sendiri, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat akan dengan mudah menarik dukungan yang pada hakikatnya Partai NU juga akan mengalami elektabilitas yang tinggi.¹⁸

Di saat situasi pemerintahan yang kacau-balau diakibatkan dengan munculnya pemberontakan DII/TII di berbagai daerah, maka pada 11-15 April 1953, para tokoh Umat Islam mengadakan Mukhtamar Alim Ulama se-Indonesia bertempat di Medan, dengan menghasilkan keputusan: Bagi umat Islam wajib hukumnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum baik untuk anggota Konstituante ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Disamping mengadakan Mukhtamar Alim Ulama untuk meraup suara umat Islam, Partai NU yang melihat kondisi negara yang kacau, pemberontakan terjadi di berbagai daerah, maka pada 1953 menjelang 1954, NU mengadakan

¹⁷ ANRI. Pembentukan NU di Tjibadak, No. 1105/Tnf/II/55. 27 Muharram 1375/ 15 September 1955. NU 1948-1979. 1907.

¹⁸ Budi Sujati, *Tradisi budaya masyarakat Islam di Tatar Sunda (Jawa Barat)*, (Kerinci: Jurnal Ishlah; Journal of Ushuluddin, Adab dan Dakwah Studies, Vol. I No. 1. 2019). 38.

konferensi para Ulama dibawah pimpinan Menteri Agama Kyai Masykur. Dengan keputusan memprakarsai memberikan gelar prestisius kepada presiden Ir. Soekarno dengan gelar *Waliyul Amri Dlaruri Bisyauckati* (Pemerintahan sementara kekuasaan secara *de Facto*) yang dituangkan dalam keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas pada 1954 dan dipertegas oleh keputusan Mukhtamar NU ke-XX di Surabaya pada 8-13 September 1954.¹⁹



Para kyai berkumpul di Istana Bogor untuk memprakarsai pemberian Gelar Waliyul Amri Bisyauckati kepada Presiden Soekarno pada 1954
(Sumber: Koleksi Fanspage galeri Nahdlatul Ulama)

Gelar tersebut bisa dipahami sebagai dukungan NU kepada pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Ir. Soekarno untuk menjaga keamanan, dan ketertiban negara dengan munculnya berbagai pemberontakan atas nama Islam di berbagai daerah dengan munculnya Darul Islam Indonesia (DII) dibawah pimpinan S.M. Kartosoewiryo dengan mendapatkan gelar Imam tertinggi oleh para pengikutnya yang berpusat di Jawa Barat.²⁰ Maka gelar NU tersebut sebagai tandingan untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam agar mematuhi segala perintah dari penguasa yang sah. Dalam

¹⁹ Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk DPR*, (Jakarta: Leknas LIPI, 1971), 49.

²⁰ Dinas Sejarah Militer, *Sejarah TNI-AD 1945-1973: Peranan TNI-AD Menegakan Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 1979), 199.

pembekalan yang diberikan kepada para pejabat di Kementerian Agama, jika dikaitkan dengan gelar *Waliyul Amri Dlaruri Bishaukaty* bahwa pemberian gelar tersebut adalah inisiatif untuk melakukan kampanye anti DII/TII.²¹



Para kyai sedang berpose setelah pemberian gelar *Waliyul Amri Dlaruri Bisyauckati* kepada presiden Soekarno didepan Istana Bogor
(Sumber: *Koleksi Fanspage galeri Nahdlatul Ulama*)

Sedangkan menurut hukum Islam (Fiqih) adanya kepala pemerintahan yang sah menurut Agama Islam, antara lain demi keabsahan pertikaian seseorang yang menurut hukum Islam walinya wali hakim. Wali hakimnya adalah kepala negara atau pejabat yang diangkat oleh kepala pemerintahan, dalam hal ini Menteri Agama dan aparaturnya sampai di tingkat kecamatan (KUA). Menurut hukum Islam (Fiqih), tidak sah wali hakim di daerah (Kepala KUA) kalau kepala negaranya tidak sah secara agama, kalau walinya tidak sah maka pernikahannya pun tidak sah. Oleh karena itu, dalam keadaan “negara” agak kacau ada yang mengakui dan tidak mengakui Presiden Soekarno sebagai kepala negara. NU menetapkan Soekarno untuk memberikan pengakuan secara agama bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno mendapatkan restu dari para ulama-ulama yang mewakili kekuasaan negara kepada pemerintah yang sah dan berdaulat.

²¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), 171.

Partisipasi NU Jawa Barat dalam kegiatan Pemilu 1955

Pada 1954 diadakanlah Mukhtamar NU ke-20 yang diselenggarakan di Surabaya. Dalam mukhtamar ini merupakan Mukhtamar pertama yang diselenggarakan semenjak NU berubah haluan menjadi partai politik. Mukhtamar ini bersepakat menyetujui rencana pembentukan organisasi baru yang berafiliasi dengan NU seperti Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU), dan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dengan tujuan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terorganisir dengan baik. Pada mukhtamar ini merupakan tahap konsolidasi NU dalam menghadapi pemilu pertama di Indonesia pada 1955.

Selama tiga tahun sebelum diselenggarakannya Pemilu tahun 1955 Partai NU mampu bersaing dengan Partai-Partai Islam terutama dengan Masyumi yang dianggap sebagai rival utama dalam memperebutkan suara dari umat Islam di Jawa Barat sehingga mampu meraup perolehan suara dengan urutan kedua untuk sesama Partai Islam. Hal ini dikarenakan basis dukungan Partai NU tersebar secara merata di berbagai daerah dengan mayoritas yang beragama Islam, berbeda dengan dukungan warga Nahdliyin yang sangat kuat terutama di Jawa Timur. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Partai Nahdlatul Ulama Jawa Barat dalam menghadapi pemilihan umum adalah Partai NU khususnya di Jawa Barat harus memiliki tenaga-tenaga (SDM) atau alat-alat yang cukup militan dan produktif dalam memperjuangkan NU. Salah satu usulan tersebut dikemukakan Pengurus Wilayah Partai NU Jawa Barat kepada PBNU agar KH. Dimjati dari Jawa Barat digantikan kedudukannya sebagai anggota DPR-GR oleh H. Amin Iskandar bekas Duta Besar RI di Baghdad, Iraq. Dan menyarankan agar KH. Dimjati untuk mengasuh pesantren agar lebih produktif kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian.²² Hal itu menunjukkan

²² ANRI. Usul Penggantian Anggota DPR, No. 020/Tanf/A-2/V-67. 17 Mei 1967. NU 1948-1979. 2487.

bahwa kepemimpinan seorang tokoh dalam memimpin Pemerintahan harus memiliki wawasan politik yang luas, jiwa yang masih energik, dan pengalaman yang banyak disamping ilmu agama juga harus mendalam. Oleh karenanya, Partai NU sangat hati-hati dalam memunculkan figur tokoh dalam mendapatkan pengaruh dari masyarakat Jawa Barat.

Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan di Indonesia khususnya di Jawa Barat, Partai NU hanya mendapatkan perolehan suara terbesar ke-4 di Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya umat Islam yang tinggal di pedesaan yang merupakan basis pendukung NU masih belum mengenal Partai NU, Selanjutnya kyai-kyai yang memiliki kharisma dan wibawa di desa-desa juga masih mendukung Masyumi dikarenakan masih setia kepada persatuan Umat Islam di bawah naungan Masyumi dalam satu partai sehingga suara NU masih di bawah PKI yang menempati urutan ketiga, selanjutnya karena alat peraga kampanye yang dilakukan oleh partai NU tidak sebanyak partai Masyumi, PNI, dan PKI bahkan gaya kampanye Masyumi yang dimotori oleh M. Isa Anshory sangat vocal dan lantang sehingga sangat wajar jika Partai NU menempati urutan keempat di Jawa Barat hal yang berbeda sangat jauh jika melihat perolehan suara NU di daerah Jawa Timur yang mengalami kemenangan telak atas PKI, PNI, bahkan Masyumi.

Berikut ini hasil suara hasil pemilihan umum untuk DPRD tingkat provinsi dan kabupaten meliputi 16 Kabupaten/Kotapraja di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No	Partai	Tingkat	Suara	Tingkat	Suara
1	Masyumi	I	1.729.973	II	1.342.893
2	PKI	I	827.843	II	1.014.957
3	PNI	I	681.194	II	915.656

4	NU	I	459.110	II	524.881
---	----	---	---------	----	---------

Sumber: ANRI: NU 1948-1979. 2309.



Kampanye dari Peserta Pemilu 1955 di Kota Bandung
(Sumber : Koleksi Galeri Fanspage Nahdlatul Ulama)

Berikut ini jumlah suara yang di dapat oleh Partai NU pada pemilihan umum 1955 untuk DPR berdasarkan tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia.

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara Resmi
1	Jawa Timur	3.370.554
2	Jawa Tengah	1.772.306
3	Jawa Barat	673.552
4	Jakarta Raya	120.696
5	Sumatera Selatan	115.938
6	Sumatera Tengah	71.959
7	Sumatera Utara	87.772
8	Kalimantan Barat	37.948
9	Kalimantan Selatan	380.874
10	Kalimantan Timur	20.795
11	Sulawesi Tengah	21.619
12	Sulawesi Selatan	159.193

13	Maluku	Nihil
14	Nusa Tenggara Timur	17.684
15	Nusa Tenggara Barat	104.279
16	Irian Barat	Nihil
Jumlah		6.955.166

Sumber: ANRI: NU 1948-1979. 1956. 2309.

Berdasarkan tabel diatas, kemenangan yang diraih Partai NU dari ke-16 Provinsi diatas diraih di daerah Jawa Timur karena daerah tersebut merupakan salah satu basis pesantren dengan dukungan kepada NU yang sangat militan dan beberapa kabupaten di Jawa Timur memiliki kyai-kyai yang secara jaringan keilmuan dan kekerabatan adalah pernah belajar atau memiliki kekerabatan dengan KH. Hasyim Asyari selaku pendiri Nahdlatul Ulama berbeda dengan karakteristik dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada pemilihan umum 1955 di tingkat I untuk DPRD Jawa Timur Partai NU mendapatkan suara 2.970.560 diikuti dengan PKI yang memperoleh suara 2.671. 436, kemudian PNI dengan suara 1.880.332 dan Masyumi dengan suara 671.436.²³

Sedangkan di Jawa Tengah dengan basis pesantrennya yang tidak sekuat di Jawa Timur dan Islam Militannya tidak se-fanatik di Jawa Barat, maka PKI dengan mudah mampu memenangkan perolehan suara untuk DPRD terbanyak dari para pesaingnya dalam 4 besar perolehan suara di tingkat I dalam pemilihan umum 1955. Dengan perolehan suara PKI sebanyak 2.526.403 diikuti oleh PNI dengan suara 2.189.256 kemudian NU dengan memperoleh suara 1.639.850 dan Masyumi hanya mendapatkan suara 686. 464. Hal ini dikarenakan Jawa Tengah merupakan basis para pendukung Barisan Tani Indonesia (BTI) yang mendukung PKI dengan nilai-nilai sosialisme yang kuat disana sehingga partai-partai Islam hanya

²³Budi Sujati, Ajid Thohir, *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat*, (Brebes: Rahmadina Publishing, 2020), 289.

menempati posisi ketiga dan keempat dalam perolehan suara dalam 4 partai besar dibawah PKI dan PNI.²⁴

Adapun di Jawa Barat yang terkenal dengan masyarakat Islamnya yang militan dengan sejarahnya sebagai salah satu pendiri Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam Indonesia (DII) pimpinan oleh SM. Kartosoewiryo yang berpusat di Jawa Barat, aspirasi mayoritas warganya mendukung Partai Masyumi dalam memenangkan Pemilu untuk DPRD tahun 1955 di Jawa Barat sangat kuat ditambah sebagian besar kyai/ajengan yang masih belum mengetahui adanya Partai NU dan sebagian ada yang mengetahui Partai NU namun dikarenakan NU mendukung konsep NASAKOM maka para kyai ada yang masih ragu-ragu mendukung partai NU sehingga Masyumi mampu menang dengan telak atas lawan-lawannya dengan perolehan suara 1.729.973 diikuti oleh PKI dengan mendapatkan suara 827.843 disusul oleh PNI dengan mendapatkan suara 681.843 dan NU hanya mendapatkan suara 459.110.²⁵

Inilah jumlah perincian suara yang di dapat oleh Partai NU di daerah pemilihan umum untuk tiap-tiap kabupaten di Provinsi Jawa Barat untuk DPR atau Konstituante pada tahun 1955.

No	Kabupaten	Jumlah Suara Resmi
1	Serang	50.094
2	Pandeglang	23.940
3	Lebak	11.689
4	Tangerang	9.894
5	Bekasi	28.070
6	Krawang	43.211
7	Purwakarta	27.755
8	Kota Besar Bogor	8.195
9	Bogor	43.128

²⁴ Budi Sujati, Ajid Thohir, *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat*, (Brebes: Rahmadina Publishing, 2020), 289.

²⁵ ANRI. Hasil Pemilihan Umum DPRD kabupaten/Provinsi No.211/B/Lap./XX/57, 17 September 1957. ANRI: NU 1948-1979. 2314.

10	Sukabumi	21.188
11	Tjiandjur	35.751
12	Bandung	45.971
13	Sumedang	9.485
14	Garut	24.355
15	Tasikmalaja	79.754
16	Tjiamis	24.616
17	Tjirebon	105.317
18	Kuningan	6.353
19	Madjalengka	11.078
20	Indramaju	40.849
21	Kota Bandung	16.831
22	Kota Cirebon	6.128
Jumlah		673.552

Sumber: ANRI. NU 1948-1979. 2309.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa jumlah suara yang didapatkan oleh Partai NU di tiap cabang-cabang wilayah Jawa Barat presentasi suaranya sangat kecil untuk DPR bila dibandingkan dengan kabupaten Cirebon yang mendapatkan kemenangan. Berdasarkan angka diatas hasil pemilihan umum di wilayah Jawa Barat, Partai NU kurang mendapatkan simpati dari masyarakat Jawa Barat menurut Lajnah Pemilihan umum NU (Lapunu) disebabkan: (1). Waktu pemungutan suara hujan terus-menerus sehingga banyak pemilih yang tidak datang ke TPS, (2). Para warga dan simpatisan NU banyak yang sakit, bepergian ke luar daerah, (3). Para warga NU dan simpatisan banyak yang tidak terdaftar (contoh disatu TPS) dari 300 pemilih 80% terdapat 80 warga NU yang tidak terdaftar, akibatnya dari kelalaian dan kurang aktifnya warga-warga NU sendiri, (4). Kurang giatnya waktu kampanye, disebabkan terutama soal keuangan dan kurangnya mubaligh dari luar daerah terutama dari orang-orang PBNU kalau warga NU dan simpatisan pada khususnya didalam kampanye mendengarkan ada mubaligh NU dari PB (Pengurus Besar) atau daerah lain dapat perhatian besar sekali,

bisanya kalau hanya orang-orang dari cabangnya sendiri karena sudah biasa mengenal dianggaplah biasa.²⁶

Begitu juga dengan segala persiapan yang sangat sedikit (minim) dalam mempersiapkan para kader, simpatisan, para tokoh dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh NU dan dikatakan NU merupakan sebuah partai yang baru berdiri sekitar 3 tahun sebelum diadakannya pemilu 1955 tetapi untuk spasial Jawa Barat berhasil mendapatkan perolehan 4 besar.

Sebagai gambaran hasil pemilihan umum tingkat II Sekabupaten Purwakarta²⁷ untuk tiga cabang yakni Subang, Sukamandi, dan Purwakarta.

PPS bagian Cabang	DRPR Prov.	DPRD Kab.	DPR	Konstituante	Bandingan Kolom 3-5	
1	2	3	4	5	Maju	Mundur
Subang	357	339	325	350	49	-
Kalijati	445	497	496	515	-	18
Pagaden	501	610	369	391	219	-
Segalaherang	384	448	401	342	106	-
Cisalak	3.069	3.350	3.361	3.323	27	-
Jumlah cabang Subang	4.756	5.304	4.952	4.921	401	18
					Maju	383
PPS bagian Cabang	DRP R	DPRD Kab.	DPR	Konstituante	Bandingan Kolom 3-5	

²⁶ ANRI. Partai Nahdlatul Ulama Tjabang Kebumen perihal untuk bahan Research No. 5540/Tanf/58. NU 1948-1979. 2314.

²⁷ Kabupaten Subang yang pada awalnya masih menjadi bagian dari kabupaten Purwakarta dengan Ibukotanya di Subang, baru dimekarkan menjadi kabupaten Subang secara resmi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1968 berdasarkan UU Republik Indonesia (UU) No 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Lihat: UU Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1968 (4/1968) tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat.

	Prov.					
1	2	3	4	5	Maju	Mundur
Ciasem	2.720	3.003	3.154	3.108	-	105
Purwadadi	309	357	318	347	10	-
Pabuaran	1.612	1.859	1.945	1.844	15	-
Pamanukan	2.805	3.175	3.351	3.271	-	96
Binong	2.040	2.387	1.869	1.735	652	-
Pusakanagara	3.377	3.868	3.912	3.349	519	-
Jumlah cabang Sukamandi	12.863	14.649	14.529	13.654	1.196	201
					Maju	995

PPS bagian Cabang	DRPR Prov.	DPRD Kab.	DPR	Konstituante	Bandingan Kolom 3-5	
1	2	3	4	5	Maju	Mundur
Purwakarta	2.230	2.457	1.825	2.190	267	-
Cempaka	1.142	1.275	1.296	2.661	-	1.386
Plered	4.952	5.668	3.896	6.045	-	1.386
Wanayasa	1.914	2.227	1.259	1.140	1.087	-
Jumlah cabang Purwakarta	10.238	11.627	8.274	12.036	1.354	1.763
					Mundur	409
Jumlah sekabupaten Subang	27.857	31.850	27.755	30.611	2.951	1.988
					Maju	969

Sumber: ANRI. NU 1948-1979. 2309.

Jika melihat tabel diatas, di kabupaten Purwakarta terdiri dari 3 cabang NU yakni: Purwakarta, Subang dan Sukamandi. Maka

dengan ini disertai dengan daftar perincian dari perolehan suara masing-masing cabang, dengan perbandingan (maju-mundurnya), dengan catatan bahwa pendapatan di provinsi ada lebih rendah dari pendapatan kabupaten disebabkan salah satunya dalam tanda gambar peserta partai provinsi sangat terlalu banyak sehingga sangat menyulitkan para pemilih untuk mencoblos Partai NU dikarenakan masyarakat kebanyakan masih belum mengetahui lambing Partai NU.

Selain itu di kabupaten Purwakarta ada Partai PKI yang perolehan suaranya sedikit melebihi partai NU. Maka rancangan untuk pembagian kursi DPRD kabupaten:

- a. Kalau banyaknya suara yang tidak berharga dihitung masuk suara (hadir) sehingga ada suara hadir 483.530 maka kieskusen²⁸ ada 13.815 suara, dan NU akan mendapatkan 2 kursi.
- b. Tapi kalau banyaknya suara yang tidak berharga tidak dihitung hadir, maka Kieskusen akan ada 13.204 suara, dan NU akan mendapat pembagian ke II Gerpis (Gerakan Pilihan Sunda) tidak dapat kursi, sebab sisa suara NU ada yang lebih besar dari pada Gerpis. Sedang partai lainnya memakai jalan a atau b sama saja. Diantaranya: (1). PKI memperoleh 9 kursi, (2). PNI memperoleh 8 kursi, (3). Masjumi memperoleh 7 kursi, (4). NU memperoleh 2 atau 3 kursi, (5). Lainnya 1-1.²⁹

Ketika Presiden Soekarno mengajukan gagasan Demokrasi Terpimpin pada Februari 1957, NU Jawa Barat tidak menunjukkan sikap penolakannya secara tegas, berbeda dengan Masyumi yang menentang dengan sikap vokal, bahkan dalam sidang pleno 9-10 Maret 1957, bersama majlis konsul-konsul Partai NU se-Indonesia, NU akhirnya menyetujui gagasan tersebut, salah satunya naskah pidato dari KH. Masykur mengenai Pancasila yang harus di

²⁸ Kieskusen adalah jumlah perolehan suara untuk calon lebih dari satu minimal 20% dan untuk calon tunggal minimal 50% + 1 suara dari surat suara yang masuk yang harus diperoleh calon pemilih.

²⁹ ANRI. Partai NU tjabang Subang perihal hasil Pemilihan umum, 16 September 1957. NU 1949-1979. 2309.

ikhtiarkan untuk seluruh cabang-cabang Partai Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia adalah di Kotapraja Bandung.³⁰ Pada saat itu kelompok modernis diwakili dengan Masyumi menginginkan Pembentukan negara Islam sesuai dengan Piagam Jakarta. Oleh karenanya, Keterimaan NU terhadap Pancasila tersebut berlandaskan pada prinsip “Menghindari bahaya didahulukan dari mengambil masalah” (*Darul Mafaasid Muqaddamun ‘ala Jalbil Masalikh*), karena NU menilai romantisme Presiden Soekarno dengan Komunis yang semakin mesra. Prinsip yang sama juga dilaksanakan tatkala NU berkoalisi dengan PNI, ketika membentuk kabinet Djuanda. Dengan melalui prinsip-prinsip yang berakar pada kaidah-kaidah *Fiqhiyah* yang dianutnya, NU dikatakan bisa memerankan politiknya yang akomodatif, termasuk ketika menghadapi permasalahan mengenai ideologis tentang falsafah hidup bangsa Indonesia yang berimplikasi pada munculnya Dekrit Presiden³¹

3. Penutup

Kongres Al-Islam Pertama yang diselenggarakan di Cirebon pada 1922 merupakan langkah awal dari ulama-ulama tradisional untuk mewujudkan persatuan dalam ikatan organisasi. Sehingga ketika Nahdlatul Ulama dibentuk pada 1926 kehadiran Nahdlatul Ulama di Jawa Barat merupakan salah satu reaksi dari munculnya organisasi-organisasi Islam lokal yang tumbuh subur di wilayah ini atas pertentangan yang muncul ke permukaan antara kubu tradisionalis dengan kubu reformis yang saling mendapat pengaruh dari dua kubu tersebut. Pertentangan antara kedua kubu terus berlanjut ketika umat Islam mendirikan Partai Masyumi sebagai persatuan umat Islam, namun dalam kegiatannya NU selalu mendapatkan pengaruh yang sangat minim di dalam Partai

³⁰ ANRI. Naskah Pidato K.H. Masjkur kepada Pengurus Tjabang Partai Nahdlatul Ulama Kotapraja Bandung, No. 1844/Tanf/VI-58. 24 Dzulqoidah 1377 H/ 12 Juni 1958. NU 1948-1979. 393.

³¹ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 106.

Masyumi, sehingga pada akhirnya pada Mukhtar ke-19 di Palembang 1952 diputuskan untuk memisahkan diri dari Masyumi.

Transformasi dari Jamiyah menjadi partai politik berdampak pula terhadap eksistensi Nahdlatul Ulama di Jawa Barat yang merupakan salah satu basis Masyumi pada waktu itu bahkan hingga sekarang. Terbukti dengan waktu hanya tiga tahun dari kegiatan Mukhtar 1952 menuju pemilihan umum 1955, untuk mempersiapkan Partai NU dalam merebut simpati warga Nahdliyin Jawa Barat dirasakan masih sangat kurang walaupun sudah dilakukan berbagai cara oleh pengurus partai untuk menarik perhatian umat Islam salah satunya dengan merekrut anggota (tokoh) yang memiliki kharisma di daerahnya, pendidikan formal yang mumpuni, dan orang yang siap berjuang dengan partai NU sehingga partai ini akan bisa mendapatkan hasil yang menggembirakan.

Walaupun beberapa cara sudah dilakukan, faktanya Partai NU mendapatkan perolehan suara di Jawa Barat hanya menduduki posisi keempat di bawah Masyumi, PNI, bahkan PKI yang menjadi musuh utama umat Islam di Jawa Barat yang terkenal militan dengan menjadi pusat gerakan DII/TII dibawah komando S.M. Kartosoewiryo. Kemenangan yang didapat oleh partai NU di Jawa Barat hanya terjadi di daerah Cirebon saja. Ada beberapa indikator yang menyebabkan perolehan suara NU kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat terutama warga Nahdliyin Jawa Barat diantaranya: (1). kyai-kyai kharismatik yang menjadi panutan masyarakat masih belum mengenal Partai NU, membenci konsep NASAKOM yang didukung Partai NU sehingga masyarakat ikut kepada para pemimpinnya, (2). Gaya kampanye partai NU yang dirasa masih kurang menarik masyarakat yang masih belum menentukan pilihannya sehingga suara umat Islam bahkan ada yang memilih PKI, (3). Alat peraga kampanye Partai NU yang masih sangat sedikit sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas.

Daftar Pustaka

Dokumen

- ANRI. Naskah Pidato K.H. Masjkur kepada Pengurus Tjabang Partai Nadhlatul Ulama Kotapraja Bandung, No. 1844/Tanf/VI-58. 24 Dzulqoidah 1377 H/ 12 Juni 1958. NU 1948-1979. No. 393.
- . Tindakan-Tindakan Konsolidasi kedalam kepada Pengurus tjabang Partai Nahdlatul Ulama Indramayu, No. 23/2/Tanf/IX-58. 19 Shafar 1378 H/ 4 September 1958. NU 1948-1979. No. 1820.
- . Sokongan Resolusi Partai/Golongan Islam di Nias, No. 220/Tanf/VII/52. 3 Dzulqa'dah 1371/ 24 Djuli 1952. NU 1948-1979. No. 1823.
- . Pembentukan NU di Tjibadak, No. 1105/Tnf/II/55. 27 Muharram 1375/ 15 September 1955. NU 1948-1979. No. 1907.
- . Partai NU tjabang Subang perihal hasil Pemilihan umum, 16 September 1957. NU 1949-1979. No. 2309.
- . Hasil Pemilihan Umum DPRD kabupaten/Provinsi No.211/B/Lap./XX/57, 17 September 1957. ANRI: NU 1948-1979. No. 2314.
- . Partai Nahdlatul Ulama Tjabang Kebumen perihal untuk bahan Research No. 5540/Tanf/58. NU 1948-1979. No. 2314.
- . Usul Penggantian Anggauta DPR, No. 020/Tanf/A-2/V-67. 17 Mei 1967. NU 1948-1979. No. 2487.
- Madjallah Berita Nahdlatuol Oelama "Congres Nummer ketiga" 9 Rajab 1356 H atau 15 September 1937 M.

Madjallah Soeara A.N.O, Congres Besar Nahdlatoel-Oelama di Surabaya ke-15, Rabiul Awwal 1359 H/ April 1940 M. No. 1, Tahoen ke-3.

Buku

- Aboebakar. (1957). *Sedjarah Hidup K.H. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Djakarta: Panitia Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hasjim.
- Alfian. (1971). *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk DPR*. Jakarta: Leknas LIPI.
- Anam, Choirul. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia.
- Bruinessen, Martin van. (2009). *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Dinas Sejarah Militer. (1979). *Sejarah TNI-AD 1945-1973: Peranan TNI-AD Menegakan Negara Kesatuan RI*. Jakarta: Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Fealy, Greg. (2009). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Noer, Deliar. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Purnama, Agung. (2017). *Pergulatan Pemikiran kyai Nahdlatul Ulama dengan kaum modernis Islam di Jawa Barat (1930-1937)*. Bandung: Jurnal Patanjala Vol. 9 No. 2 Juni.

- Purnama, Agung. (2017). *Jamiyah Nadhlatul Ulama di Jawa Barat 1926-1945*. Sumedang: Tesis Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Rais, Dhiaudin. (Penj). Hayyie al-Kattani, Abdul. (2001). *Toeri Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saeful Muhtadi, Asep. (2004). *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES.
- Sujati, Budi. (2019). *Tradisi budaya masyarakat Islam di Tatar Sunda (Jawa Barat)*. Kerinci: Jurnal Ishlah; Journal of Ushuluddin, Adab dan Dakwah Studies, Vol. I No. 1.
- Sujati, Budi & Thohir, Ajid. (2020). *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat*. Brebes: Rahmadina Publishing.
- Zahro, Ahmad. (2004). *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS.
- Zuhri, Saifudin. (1955). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Penerangan RI.